

**KETIDAKSELARASAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA TERKAIT PERAN PEMERINTAH
DAERAH MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA**

SKRIPSI



Oleh :

MUCHAMMAD AKMAL AL KHASYI'

NBI: 1311800140

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**KETIDAKSELARASAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA TERKAIT PERAN PEMERINTAH DAERAH MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA**

SKRIPSI



Oleh:

MUCHAMMAD AKMAL AL KHASYI'

NBI: 1311800140

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**KETIDAKSELARASAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA TERKAIT PERAN PEMERINTAH DAERAH MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

MUCHAMMAD AKMAL AL KHASYI'

NBI : 1311800140

Dosen Pembimbing :

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., AEPP@., CMC.

NPP/NIP: 20310130613

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**KETIDAKSELARASAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA TERKAIT PERAN PEMERINTAH DAERAH MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA**

Oleh:

MUCHAMMAD AKMAL AL KHASYI'

NBI: 1311800140

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 11 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal : 8 Juli 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD.

NPP : 20310180776



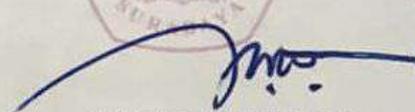
Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., AEPP®, CMC.

NPP : 20310130613



Anggota : Dr. Frans Simangungsong, S.H., M.H.

NPP : 2031020082



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchammad Akmal Al Khasyi'

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“KETIDAKSELARASAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA TERKAIT PERAN PEMERINTAH DAERAH MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



MUCHAMMAD AKMAL AL KHASYI'

NBI : 1311800140

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchammad Akmal Al Khasyi'

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“KETIDAKSELARASAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA TERKAIT PERAN PEMERINTAH DAERAH MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



MUCHAMMAD AKMAL AL KHASYI'

NBI : 1311800140

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchammad Akmal Al Khasyi'
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul:

**"KETIDAKSELARASAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA TERKAIT PERAN PEMERINTAH DAERAH MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain, Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 19 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



MUCHAMMAD AKMAL AL KHASYI'

NBI : 1311800140

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchammad Akmal Al Khasyi'
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memeberikan kepada badan perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“KETIDAKSELARASAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA TERKAIT PERAN PEMERINTAH DAERAH MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tapa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 19 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



MUCHAMMAD AKMAL AL KHASYI'

NBI : 1311800140

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk kampung halaman saya daerah dan desa saya, sebagai bentuk dedikasi dan pengabdian saya kepada daerah dan desa tercinta.

“Sejauh-jauhnya kita pergi jangan lupa untuk kembali (ke Desa) meskipun hanya ide-ide dan gagasan-gagasan kita”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah swt. penulis panjatkan atas semua anugerah kehidupan, lindungan dan bimbingannya, serta berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Berangkat dari ketertarikan penulis terhadap fenomena pembangunan yang ada di daerah dan desa, dan pengalaman selama empat tahun mengabdikan diri kepada desa melalui organisasi kepemudaan Karang Taruna desa maka penulis mengambil judul "KETIDAKSELARASAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DENGAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT PERAN PEMERINTAH DAERAH MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA"

Dalam sejarah pengaturannya, pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah terus mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Ide-ide untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terwujud dengan lahirnya undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan fondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa ditemukan adanya beberapa fenomena seperti bias perkotaan dalam pembangunan desa dan fenomena patologi atau gangguan dalam pembangunan desa. Dengan menguatnya komitmen pemerintah untuk membangun desa melalui NAWACITA", pada urutan ke-3 yaitu, "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan". Dalam pelaksanaannya tidak berjalan mulus karena adanya patologi pembangunan desa yang cukup memengaruhi akselerasi pembangunan desa. Walaupun terjadi kondisi patologis, namun pembangunan masyarakat desa tetap dilaksanakan secara berkelanjutan karena melihat kondisi obyektif penduduk Indonesia masih dominan bertempat tinggal di pedesaan, dilihat dari tingkat kesejahteraan mereka masih rendah sehingga wajar jika pembangunan masyarakat desa masih merupakan prioritas utama di Indonesia.

Skripsi ini selain disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana juga untuk menambah literatur. Selain itu, dapat pula dijadikan bahan referensi bagi Pemerintah desa dan stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan

pembangunan desa yang dikaji dalam perspektif hukum dan sosiologis sesuai periode pemerintahan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Kepada Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Kepada Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Kepada Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., AEPP®, CMC. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Segenap dosen dan seluruh staf akademik yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada senior saya yang ikut memberi dukungan, Ah. Faiz MN Abdallah S.H., M.H. (Tenaga Ahli Bupati Gresik)
8. Kepada Ibu Sekar Arum, (Ketua Pokdarwis, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik)
9. Kepada Bapak Mat Rofik S.Ag. (Kepala Desa Katenen)
10. Kepada Mas Ah Habibul Isnaini S.Pd. (Tokoh Masyarakat/Pemuda Dusun Shoberoh)
11. Kepada teman-teman saya di pengurus Karang Taruna Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang telah memberi masukan dan dukungan dalam proses skripsi ini.
12. Kepada teman-teman saya di Forum Mahasiswa Panceng yang telah memberikan gambaran pengabdian kepada desa secara nyata.
13. Kepada teman-teman seperjuangan kuliah saya yang telah memberikan dan membagikan informasi selama perkuliahan.

Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang yang tidak bisa peneliti sebutkan satupersatu. Semoga

Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti umumnya kepada para pembaca.

ABSTRAK

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan Desa mempunyai kewenangan mengatur rumah tangga sendiri salah satunya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa untuk dapat memberikan kehidupan kesejahteraan sehingga perlu digali potensi lokal yang ada pada desa. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ada beberapa pasal yakni pasal 112 hingga pasal 115 yang menunjukkan peran pentingnya Pemerintah Daerah dalam menunjang pembangunan desa. Namun Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu dasar hukum bagi peraturan-peraturan pemerintah daerah tidak memberikan pengaturan yang jelas dan selaras dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di lain sisi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga tidak mengamanatkan bagaimana bidang sektoral (Perangkat daerah) tingkat kabupaten dapat berkoordinasi dengan desa dalam penyediaan layanan dasar disamping memberikan pembinaan dan pengawasan (Binwas) yang bersifat teknis kepada desa, dan hanya mengamanatkan urusan desa kepada satu bidang saja, Hal ini menyebabkan permasalahan di lapangan yang menjadikan dukungan Pemerintah Daerah terhadap Pembangunan Desa menjadi semakin kecil.

Kata Kunci : Desa, Pemerintah Daerah, Pembangunan

ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 on Villages state that the Village has the authority to regulate its own household, one of which is to provide welfare for the village community through community empowerment and village development in order to provide a prosperous life, so it is necessary to explore the local potential of the village. Several articles in Law Number 6 of 2014 on Villages, including Articles 112 to 115, highlight the importance of the role of Regional Governments in encouraging village development. Several articles in Law Number 6 of 2014 on Villages, including Articles 112 to 115, highlight the importance of the role of Local Governments in encouraging village development. Law Number 23 of 2014 concerning Local Government, which is one of the legal underpinnings for regional government regulations, is unclear and contradicts Law Number 6 of 2014. Furthermore, except from offering technical guidelines, Law Number 23 of 2014 Ruling Local Government does not specify how the sectoral sector (regional apparatus) at the district level might collaborate with villages in the provision of basic services in addition to providing guidance and supervision, and only mandates village affairs to one field only, this poses challenges on the ground, which reduces local government support for village development.

Keywords: Village, Local Government, Development

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian :.....	7
1.5.2 Metode Pendekatan :.....	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Data:.....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.5.5 Teknik Analisis Data.....	9
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Desa.....	11
2.1.1 Pengertian Desa.....	11
2.1.2 Pengertian Pembangunan Desa.....	13
2.2 Pemerintah Daerah.....	18
2.3 Ketidakselarasan.....	21
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Letak ketidakselarasan UU No. 23 Tahun 2014 dengan UU No. 6	

Tahun 2014 sehingga bisa menghambat Pemerintah Daerah dalam menunjang Pembangunan Desa	25
3.1.1 Otonomi Daerah dan Otononomi Desa.....	25
3.1.2 Peraturan Daerah dan Desa dari Masa-kemasa.....	36
3.1.3 Dampak dari Ketidaksielarasan Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Desa	59
3.2 Upaya dari Pemerintah Pusat untuk mengatasi ketidaksielarasan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2014.....	67
3.2.1 Ketidaksielrasan atau Disharmonisasi Undang-Undang di Indonesia.....	67
3.2.2 Upaya Penyelesaian atau Sinkronisasi Pemerintah Pusat	72
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan	75
4.2 Saran	77
DAFTAR BACAAN	79
LAMPIRAN	83
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dan Wawancara	83
Lampiran 2. Draft Pertanyaan Wawancara	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Wawancara dengan Kepala Desa Ketanen.....	62
Gambar 3.2	Penyuluhan dan Sosialisasi dari Fakultas Hukum Universitas Agustus 1945 Surabaya	62
Gambar 3.3	Penyuluhan dan Sosialisasi dari Fakultas Hukum Universitas Agustus 1945 Surabaya	63
Gambar 3.4	Wawancara dengan Tokoh Pemuda Dusun Shoberoh	65
Gambar 3.5	Wawancara dengan POKDARWIS Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbedaan Desa Lama dan Desa Baru	53
Tabel 3. 2 Kedudukan Desa di Setiap Undang-Undang.....	56
Tabel 3. 3 UU No.6 Tahun 2014 dan UU No.23 Tahun 2014 Menetapkan Peran Berbeda untuk Dukungan Pemerintah Daerah Kepada Desa	58